

Analisis Return On Asset Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia

Dedi Kusmayadi

Dampak Inflasi Terhadap Resiko Keuangan Bank Syariah

Irman Firmansyah, Jajang Badruzaman

Pengaruh Kompensasi Finansial Dan Non Finansial Terhadap Kinerja Karyawan

Pamela Prathiwi, Euis Rosidah

Pengaruh Laba Operasional Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan

Fitria Gustiyani

Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Bank

Nisa Noor Wahid

Pengaruh Dukungan Pimpinan Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Penerapan Good Governance Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Jajang Badruzaman

Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas Terhadap Harga

Nizar Nazarrudin

Alamat Redaksi



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya

Telp. : 0265-3330634

Fax : 0265-325812

e-mail : lp2m@unsil.ac.id

Jurnal Akuntansi

Volume 9, Nomor 1, Januari – Juni 2014

PEMIMPIN REDAKSI

Iman Pirman Hidayat

DEWAN REDAKSI

Kartawan

Deden Mulyana

Dedi Kusmayadi

Asep Yusup Hanapia

Jajang Badruzaman

Tedi Rustendi

Usman Muljakusumah

Maman Suherman

Rani Rahman

STAF REDAKSI

Irman Firmansyah

Iwan Hermansyah

BENDAHARA

Euis Rosidah

Rd. Neneng Rina

Alamat Redaksi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya

Telp. : 0265-330634

Fax : 0265-325812

e-mail : lppm@unsil.ac.id

Jurnal Akuntansi

Volume 9, Nomor 1, Januari – Juni 2014

PENGANTAR REDAKSI

Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Pada edisi ini (Volume 9 No. 1), redaksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada seluruh penulis yang telah memberikan sumbangsih keilmuan dan hasil penelitiannya sehingga Jurnal Akuntansi ini dapat terus terbit seiring dengan kebutuhan.

Pada edisi kali ini, tema yang disajikan diantaranya akuntansi keuangan, akuntansi syariah, akuntansi pasar modal dan akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu redaksi mengucapkan terima kasih yang setinggi – tingginya atas sumbangsih pemikirannya di bidang akuntansi.

Tentu kami akan merasa senang sekali jika ada penulis lain yang ingin ikut menayangkan hasil tulisan ilmiahnya, mengingat target Jurnal Akuntansi ini adalah mendapatkan Akreditasi Jurnal Ilmiah dari Dikti /LIPI.

Redaksi mengharapkan dukungan doa dan tulisan ilmiah selanjutnya dari para pembaca sekalian. Mudah-mudahan motto dan misi yang diusung oleh Jurnal Akuntansi “*Mengabdikan Demi Ilmu Pengetahuan*” dapat terealisasi. Amin.

Tasikmalaya, Nopember 2014

Redaksi

Jurnal Akuntansi

Volume 9, Nomor 1, Januari – Juni 2014

DAFTAR ISI

Dewan Penyunting.	i
Pengantar Redaksi.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Analisis <i>Return On Asset</i> Dan <i>Debt To Equity Ratio</i> Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia Dedi Kusmayadi	1 – 14
Dampak Inflasi Terhadap Resiko Keuangan Bank Syariah Irman Firmansyah, Jajang Badruzaman	15 - 24
Pengaruh Kompensasi Finansial Dan Non Finansial Terhadap Kinerja Karyawan Pamela Prathiwi, Euis Rosidah	25 - 42
Pengaruh Laba Operasional Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Fitria Gustiyani	43 - 56
Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Bank Nisa Noor Wahid	57 - 66
Pengaruh Dukungan Pimpinan Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Penerapan Good Governance Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Jajang Badruzaman	67 - 86
Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas Terhadap Harga Nizar Nazarrudin	87 - 104

PENGARUH DUKUNGAN PIMPINAN DAN KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

(Sensus pada Kantor Kecamatan se Kota Tasikmalaya)

Jajang Badruzaman¹

ABSTRACT

This research entitled The Influence of Leadership Support and Competence of Accounting Staff to the Implementation of Good Governance and its Impact on the Quality of Accounting Information on Regional Finance census at Tasikmalaya City District Office, the method used is descriptive analysis, research aims To: 1). To know the effect of Leadership Support and Accounting Staff Competence to the Implementation of Good Governance in the District Office of Kota Tasikmalaya. 2). To know the influence of Leadership Support Competence Accounting Staff Implementation of Good Governance on the quality of financial accounting information in the District Office of Tasikmalaya City. Based on the results of processing conducted using SPSS version 16 it is found that the Leadership Support, Accounting Staff Competence and the Implementation of Good Governance influence both partially and simultaneously to the quality of financial accounting information in the District Office of Tasikmalaya City.

Kata kunci: Leadership Support, Accounting Staff Competence, Good Governance quality accounting information

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Penerapan *Good Governance* serta dampaknya terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah sensus pada Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya, metode yang digunakan deskriptif analisis, penelitian bertujuan Untuk: 1). Untuk mengetahui pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Penerapan Good Governance di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya. 2). Untuk mengetahui pengaruh Dukungan Pimpinan Kompetensi Staf Akuntansi Penerapan Good Governance terhadap kualitas informasi akuntansi keuangan di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16 diperoleh bahwa Dukungan Pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi dan Penerapan Good Governance berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas informasi akuntansi keuangan di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci: Dukungan Pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi, *Good Governance*, kualitas informasi akuntansi

¹ Dosen pada Jurusan Akuntansi FE UNSIL, email: jajang.badruzaman@unsil.ac.id

PENDAHULUAN

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No.1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan *accountable*, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun pada kenyataannya dewasa ini setelah berbagai usaha dilakukan baik dari adanya peraturan serta dibuatnya lembaga Pembina belum dapat memenuhi harapan pemerintah pusat mengenai karakteristik informasi keuangan yang berkualitas, hal ini sejalan dengan data yang diungkapkan oleh BPK dalam situsnya www.bpk.go.id-IHPSI tahun 2010 bahwa untuk tahun 2010 laporan keuangan pemerintah daerah yang baru diperiksa BPK berjumlah 348 sedangkan total laporan keuangan pemerintah daerah yang harus diperiksa BPK adalah 498. Penyebab dari hal tersebut diantaranya adalah disebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan belum dikatakan baik karena tidak memenuhi salah satu unsur dalam karakteristik laporan keuangan yakni relevan. Karakteristik ini salah satu unsurnya adalah informasi keuangan harus disampaikan tepat waktu. Kondisi ini bermakna bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memiliki kekurangan dalam menyajikan informasinya.

Kemudian untuk mencapai pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif, efisien transparan dan akuntabel perlu diterapkan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan Daerah berpedoman pada PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Pengendalian intern disini yaitu berhubungan dengan penempatan dan rekrutmen orang yang kompeten guna menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Orang yang berkompeten disini adalah orang yang mengetahui, memahami mengenai pembuatan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam informasi keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Keahlian ini dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Saat ini kompetensi staf akuntansi pada pemerintahan daerah menjadi sangat penting seiring dengan peraturan

yang mengharuskan perangkat daerah untuk membuat dan menyusun laporan keuangannya sendiri.

Penyusunan informasi keuangan yang baik tentunya harus dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah secara keseluruhan tanpa terkecuali termasuk di dalamnya adalah Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya yang juga termasuk ke dalam organisasi perangkat daerah. Di Kota Tasikmalaya saat ini masih banyak instansi maupun organisasi perangkat daerah yang informasi keuangannya masih jauh dibawah standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kualitas informasi keuangan di pemerintahan Kota Tasikmalaya adalah kurangnya kompetensi staf akuntansinya. Di Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya misalnya masih banyak staf bagian keuangan yang sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, ditegaskan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan berdasarkan prinsip profesionalitas sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin suku, agama, ras atau golongan. Namun pada kenyataannya posisi pengelola keuangan masih banyak dipegang oleh orang yang tidak memiliki kompetensi yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) yang memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di sub bagian akuntansi Pemerintah XYZ masih minim, job description-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan juga penelitian yang dilakukan oleh King dalam Effendi (2005) tentang penempatan pegawai negeri sipil (PNS) di beberapa daerah kota/kabupaten di Indonesia menyimpulkan bahwa: "penempatan PNS sering tidak sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan. Selain itu Menpan (2006) menyebutkan bahwa, "tingkat pendidikan birokrasi Negara Indonesia sebagian besar berpendidikan SLTA ke bawah dan rendahnya tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi kreatifitas dan inovasi dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya kompetensi staf akuntansi guna menghasilkan kualitas informasi keuangan harus sangat diperhatikan. Dinyatakan dalam jurnal keuangan oleh Erie Pratama 2010 tentang "Peningkatan Kapasitas Akuntan Pemerintah dengan Mengadopsi Sistem Pendidikan Akuntansi yang mengacu pada *Internasional Education Standard*" bahwa untuk mempertahankan mutu dan kualitas informasi salah

satu hal yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan kompetensi Sumber Daya Manusia sehingga memiliki pendidikan, keterampilan dan pengetahuan yang cukup.

Namun demikian bagaimanapun peran dukungan dari seorang pimpinan sangat diperlukan untuk pelaksanaan Good Governance dan pembenahan upaya peningkatan kompetensi staf. Dukungan pimpinan disini berfungsi untuk mendorong atau menimbulkan rasa percaya diri bagi staf untuk dapat melaksanakan pekerjaan ataupun tanggung jawabnya dengan baik khususnya staf akuntansi dalam kaitannya dengan kualitas informasi keuangan daerah. Selain itu dukungan pimpinan sangat diperlukan dalam kaitannya dengan melakukan berbagai fungsi diantaranya fungsi penentu arah, setiap Organisasi baik yang berskala besar, menengah, ataupun kecil, semuanya pasti dibentuk dalam rangka mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan itu bisa bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang harus dicapai melalui kerja sama yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Keterbatasan sumber daya organisasi mengharuskan pemimpin untuk mengelolanya dengan efektif, dengan kata lain arah yang akan dicapai oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang ada. Selain itu fungsi pimpinan lainnya yaitu fungsi juru bicara fungsi ini mengharuskan seorang pemimpin untuk berperan sebagai penghubung antar organisasinya dengan pihak-pihak luar yang bersangkutan. Peran ini sangat penting karena disadari bersama bahwa tidak ada satu organisasi yang dapat hidup tanpa bantuan dari pihak lain. Konsekuensi logis dari fungsi ini adalah bahwa seorang pemimpin harus mengetahui bukan saja bagaimana merumuskan kebijakan strategi, akan tetapi juga berbagai keputusan lain yang telah diambil oleh pimpinan yang lebih rendah, Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi Penerapan Good Governance serta dampaknya terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah (Sensus pada Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dukungan Pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi dan Penerapan Good Governance di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya..

2. Bagaimana Kualitas Informasi Keuangan di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Penerapan Good Governance di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya.
4. Bagaimana pengaruh Dukungan Pimpinan Kompetensi Staf Akuntansi Penerapan Good Governance terhadap kualitas informasi akuntansi

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka tujuan penulis mengadakan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Dukungan Pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi dan Penerapan Good Governance di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya..
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Informasi Keuangan di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Penerapan Good Governance di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dukungan Pimpinan Kompetensi Staf Akuntansi Penerapan Good Governance terhadap kualitas informasi akuntansi keuangan di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya.

KAJIAN PUSTAKA

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah telah semakin menumbuhkan kesadaran akan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Sehingga segala sesuatu dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipersiapkan dengan baik, hal ini penting karena informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh setiap *entitas* pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. akuntabilitas dan transparansi tersebut

dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparat pemerintah berjalan dengan baik.

Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Informasi keuangan daerah harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP). Informasi keuangan sangat penting keberadaannya karena informasi keuangan yang disusun dan disajikan ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan disusun secara standar dan pengguna informasi keuangan diharapkan memahami standar dan kebijakan akuntansi yang digunakan.

Informasi keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan informasi keuangan. Informasi keuangan yang disusun harus mempunyai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan untuk mendapatkan informasi keuangan yang berkualitas. Kualitas informasi keuangan ditujukan pada karakteristiknya yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Sofyan Syafari, 2007). Namun demikian kualitas informasi yang baik ini akan dipengaruhi oleh penerapan *good governance* yang dilakukan secara benar.

Good governance mengandung makna 1). tata kelola pemerintahan yang baik, 2). pengelolaan pemerintahan yang baik, 3). penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 4). penyelenggaraan administrasi negara yang baik. Institusi dari *governance* memiliki 3 domain yaitu : *state* (negara/ pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling menjalankan fungsinya masing-masing. Sementara itu menurut UNDP terdapat delapan prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, taat hukum, transparansi, responsif, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik.

Kemudian untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan memenuhi standar dan melaksanakan *good governance* tentu diperlukan dukungan manajemen puncak yang memberikan dorongan baik secara moral maupun materil. Dukungan dari seorang pimpinan sangat diperlukan dalam kaitannya untuk menjalankan berbagai

fungsi yaitu fungsi penentu arah, fungsi juru bicara, fungsi komunikator, fungsi integrator dan fungsi motivasi dan memberikan semangat kerja terhadap staf ataupun bawahannya sehingga staf atau bawahannya memiliki rasa percaya diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Taylor (1999) mendefinisikan Dukungan pimpinan sebagai "Suatu kondisi dimana seseorang diberi dorongan sehingga merasa aman dan nyaman secara psikologis. Termasuk didalamnya kesadaran dari keberadaan yang baik dan kepuasan diri dari *affec hunger* (senang akan keinginan besar)" sedangkan Willy Susilo (2002 : 243) menjelaskan dukungan pimpinan sebagai "Komitmen dan dukungan pimpinan, baik secara moral maupun materiil yang memadai sangat diperlukan.

Komitmen mengandung pengertian bahwa pimpinan perlu bersikap konsisten dan konsekuen. Konsisten berarti memberikan dukungan secara terus menerus dan konsekuen berarti bersedia memainkan peran yang diharapkan" dengan adanya dukungan dari pimpinan nantinya diharapkan staf akuntansi dapat memiliki tingkat kompetensi yang lebih baik dalam kaitannya untuk menciptakan informasi keuangan daerah yang dapat menerapkan prinsip good governance yang menunjukkan informasi yang berkualitas.

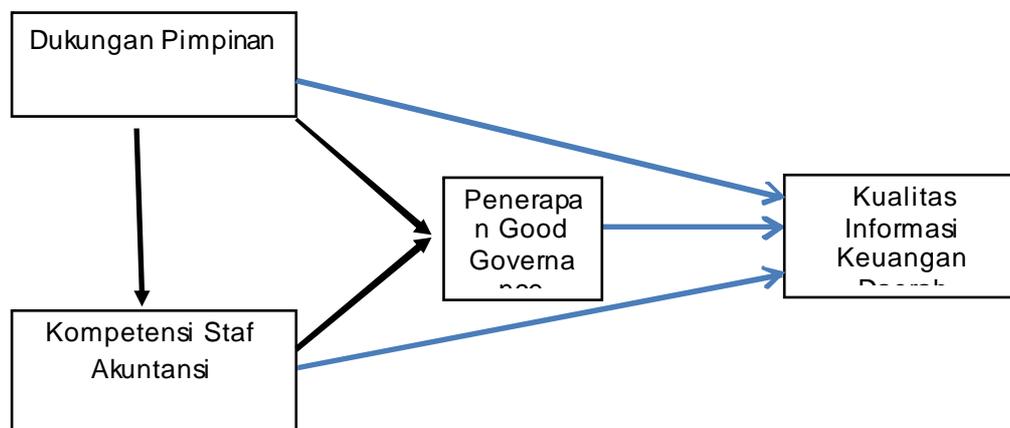
Selanjutnya dengan adanya dukungan manajemen puncak secara untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya yang berkompeten di bidang tersebut yaitu mengetahui, menguasai dan memahami bidangnya tersebut.

Kompetensi staf akuntansi menjadi sangat penting seiring dengan tuntutan masyarakat dan pemerintah pusat yang mensyaratkan pemerintah daerah harus menyampaikan dan menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar, tanpa adanya staf akuntansi yang kompeten tentu akan sangat sulit untuk menciptakan informasi keuangan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh King dalam Effendi (2005) yang menyebutkan bahwa penempatan pegawai negeri sipil (PNS) di beberapa daerah atau kabupaten sering tidak sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 ditentukan bahwa "Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara

professional, efektif, dan efisien”. Sejalan dengan hal tersebut menurut Menpan (2006) menyebutkan bahwa, “tingkat pendidikan birokrasi Negara Indonesia sebagian besar berpendidikan SLTA ke bawah dan rendahnya tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi kreatifitas dan inovasi dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya kompetensi staf akuntansi guna menghasilkan kualitas informasi keuangan harus sangat diperhatikan.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Dukungan Pimpinan berpengaruh terhadap Kompetensi Staf Akuntansi
- 2) Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance*
- 3) Dukungan Pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi dan Penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah baik secara parsial maupun simultan.

METODE PENELITIAN

Metode Yang Digunakan

Penelitian sekarang ini yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh kantor kecamatan yang ada di kota Tasikmalaya. adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah mengenai Dukungan Pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan *Good Governance* dan Kualitas Informasi.

Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah sensus, di mana bentuk penelitian yang dilakukan adalah *expelanatory research* melalui pengujian hipotesis.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Dukungan Pimpinan (X1)	Refleksi sikap postif pimpinan dalam memberikan respon terhadap suatu objek yang dihadapi (saiffudin: 2011)	-Penegakan pelaksanaan kegiatan yang mendukung terhadap kompetensi staf -komitmen dalam mendukung kompetensi staf	Ordinal
Kompetensi Staf Akuntansi (X2)	Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien".(Keputusan Kepala Badan Kepegaw aian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003)	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap	Ordinal

<p><i>Penerapan Good Governance</i></p>	<p>konsep yang memayungi berbagai paket reformasi sektor publik yang dirancang untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan positif sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi 2. Taat Hukum 3. Transparansi 4. Daya Tanggap 5. Kesetaraan 6. Efektivitas dan Efisiensi 7. Akuntabilitas 8. Visi strategik 	<p>Ordinal</p>
<p>Kualitas Informasi Keuangan Daerah (Y)</p>	<p>ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.(Kerangka Konseptual Standar akuntansi Pemerintahan :2004)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami 	<p>Ordinal</p>

Populasi Sasaran

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan Kompetensi Staf Akuntansi dalam kaitannya dengan Kualitas Informasi Keuangan Daerah yaitu Kantor Kecamatan di Kota Tasikmalaya yang meliputi :

Tabel 2.
Populasi Penelitian

No	Nama Kecamatan	Alamat	Nama Camat
1.	Kecamatan Bungursari	Jl. Raya Bungursari	Rojab Riswan T.,,Sos
2.	Kecamatan Cibeureum	Jl. KH Khoer Afandi No. 160 Tasikmalaya	Drs. Maman R. Setiadi
3.	Kecamatan Cihideung	Jl. Cieunteunggede No. 5 Tasikmalaya	Drs. Ade Hendar

4.	Kecamatan Cipedes	Jl. Cigeureung No. 93 Tasikmalaya	Dayat Mustopa, S.IP
5.	Kecamatan Indihiang	Jl. Gunungmanggu No. 2 Indihiang Tasikmalaya	Muhsin Sofyan, S.Sip
6.	Kecamatan Kawalu	Jl. Raya Cibauti No. 80 A Kawalu Tasikmalaya	Hadi Riaddy
7.	Kecamatan Mangkubumi	Jl. Cikiray Kel. Cigantang Tasikmalaya	Drs. Adang Mulyana
8.	Kecamatan Purbaratu	Jl. Depok Purbaratu	Drs. Hendar
9.	Kecamatan Tamansari	Jl. Tamanjaya No. 60 Tamansari Tasikmalaya,	Engkus Soleh Bunyamin, S.Sos
10.	Kecamatan Tawang	Jl. Siliwangi No. 72 Tasikmalaya	Drs. Asep MP, M.Si

Sumber : Situs Resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya

Metode Analisis

Teknik Pengujian Data

Sebelum melakukan pengolahan data terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap alat ukur yang akan digunakan, adapun pengujian alat ukur tersebut terbagai ke dalam dua tahap yaitu:

a. Uji Validitas (*Test of Validity*)

Rumus yang digunakan adalah produk moment (*product moment*) sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XiYi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n \sum Xi^2 - (\sum Xi)^2\} \{n \sum Yi^2 - (\sum Yi)^2\}}} \quad (\text{Conover :1980:253})$$

b. Uji Reliabilitas (*Test of Reliability*).

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data yang digunakan konsisten dalam mengungkapkan fenomena tertentu dari sekelompok individu meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda.

$$r_{.tot} = \frac{2(r_{.tt})}{1 + r_{.tt}}$$

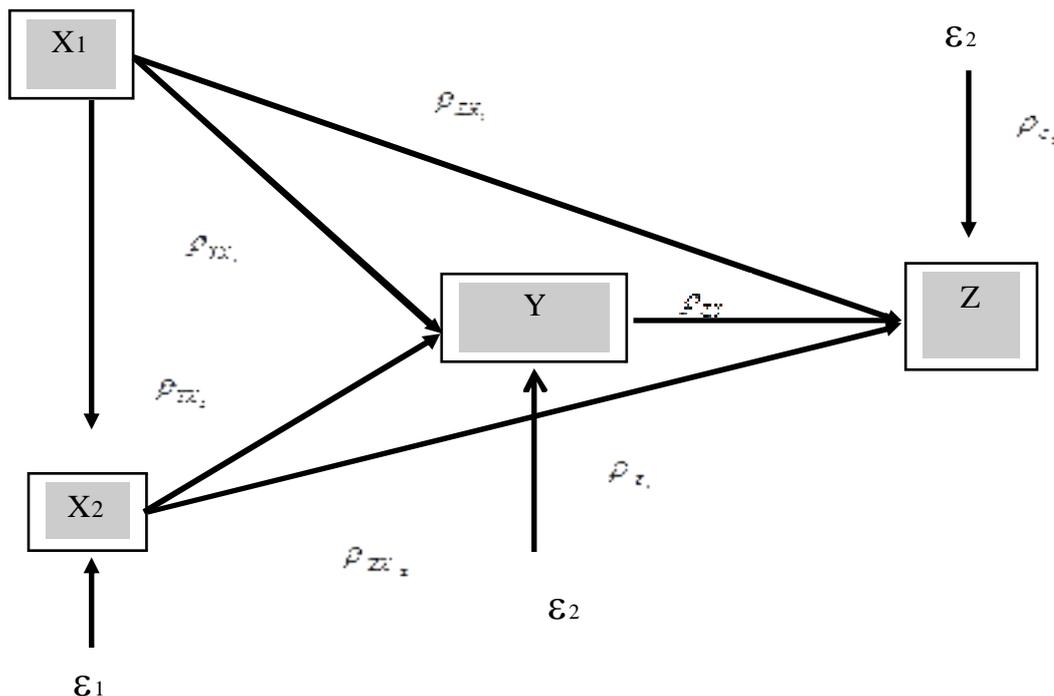
Keterangan :

r.tot : angka reliabilitas keseluruhan item

r.tt : angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua

Analisis Data dan Pengolahan Data

Setelah melakukan pengujian terhadap instrumen, maka langkah selanjutnya melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis. Pengolahan data dan pengujian data yang dilakukan tidak terlepas dari struktur model penelitian. Adapun struktur model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 2: Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

Keterangan:

- X1 = Dukungan Pimpinan
- X2 = Kompetensi Staf Akuntansi
- Y = Penerapan *Good Governance*
- Z = Kualitas Informasi
- ϵ_1 = Variabel lain yang tidak diteliti tetapi mempengaruhi Implementasi Strategi (Y)
- ϵ_2 = Variabel lain yang tidak diteliti tetapi mempengaruhi Kinerja Perusahaan (Z)
- ρ_{ZX_2} = Koefisien Jalur Xi ke Z

Dengan dilakukan pengujian terhadap uji validitas dan reliabilitas maka langkah selanjutnya melakukan transformasi data dengan *Method of Successive Interval* terhadap data-data yang mempunyai nilai pengukuran ordinal, di mana langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan banyaknya frekuensi (f)
2. Menghitung proporsi dengan rumus : $P_i = \frac{f_i}{n}$
3. Menghitung proporsi kumulatif (PK) = $p_{i-1} + p_i$
4. Menetapkan nilai Z yang diperoleh dari tabel normal baku.
5. Menghitung scale value (SV) dengan rumus :

$$SV = \frac{DaLL - DaUL}{AuUL - AuLL}$$

Setelah melakukan transformasi data, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan program SPSS Versi 16.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS Versi 16, dapat diketahui koefisien jalur masing-masing variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengaruh Dukungan Pimpinan terhadap Kompetensi Staf Akuntansi di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya.

Dari hasil perhitungan SPSS versi 16.0 (Tabel Model Summary) pada lampiran 6, diperoleh data mengenai nilai R (koefisien korelasi) dan R Square/R² (koefisien determinasi). Nilai R menunjukkan besarnya hubungan atau korelasi antara dukungan pimpinan dengan kompetensi staf akuntansi sebesar 0,448. Ini berarti antara dukungan pimpinan dengan kompetensi staf akuntansi mempunyai hubungan yaitu sebesar 44,8% dengan kategori sedang (Sugiyono, 2009:250). Sedangkan koefisien determinasi atau R² menunjukkan besarnya pengaruh dukungan pimpinan terhadap kompetensi staf akuntansi, yaitu sebesar 0,201 atau 20,1%. Artinya 20,1% variabilitas variabel kompetensi staf akuntansi dipengaruhi oleh variabel bebas yang dalam hal ini adalah dukungan pimpinan. Pengaruh faktor lainnya (faktor residu) terhadap kompetensi staf akuntansi selain dukungan pimpinan adalah sebesar 79,9%. Pengaruh faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi kompetensi staf akuntansi selain dukungan pimpinan diantaranya adalah sumber daya manusia dan fasilitas kerja.

Dengan demikian, apabila dukungan pimpinan pada Kantor Kecamatan di kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan baik maka akan menunjang terhadap kompetensi staf akuntansinya. Namun tidak signifikan, hal ini dikarenakan kompetensi staf akuntansi dipengaruhi oleh banyak faktor selain dukungan pimpinan seperti sumber daya manusia dan fasilitas kerja.

Pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Penerapan Good Governance di Lingkungan Kecamatan Kota Tasikmalaya.

Dari hasil perhitungan SPSS versi 16.0 diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,11 atau 11% secara positif. Ini menunjukkan bahwa penerapan good governance dipengaruhi oleh Dukungan pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi sebesar 11% dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengaruh dukungan pimpinan sebesar 2,46% positif artinya penerapan Good Governance akan baik jika pimpinan mendukung atas pelaksanaan Good Governance.
2. Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi sebesar 13,39 negatif positif artinya penerapan Good Governance akan baik jika staf akuntansi tidak kompeten. Ini sangat bertolak belakang dengan teori.

Hal ini berarti apabila pelaksanaan dukungan pimpinan dan kompetensi staf akuntansi pada Kantor Kecamatan di kota Tasikmalaya dilaksanakan secara bersamaan dengan baik, maka Good Governance dapat dilaksanakan pada Kantor Kecamatan di kota Tasikmalaya akan semakin baik..

Adapun faktor lain (faktor residu) yang kemungkinan mempengaruhi Good Governance selain dukungan pimpinan dan kompetensi staf akuntansi diantaranya adalah pengendalian intern, budaya organisasi, sistem informasi akuntansi. Wilopo (2006) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif akan mengurangi praktik kecurangan akuntansi yang secara otomatis dapat mempengaruhi penerapan Good Governance.

Pengaruh Dukungan Pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi Dan Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah di Lingkungan Kecamatan Kota Tasikmalaya.

Dari hasil perhitungan SPSS versi 16.0 diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,803 atau 80,3% ini menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi pemerintahan dipengaruhi oleh Dukungan pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi dan penerapan good

governance. Jika ketiga variabel meningkat maka cenderung kualitas informasi akanuntgansi akan meningkat begitu sebaliknya jika ketiga variabel tersebut menurun maka kualitas informasi akuntansi menjadi turun. Jika di perinci dapat digambarkan di bawah ini:

1. Pengaruh dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 0,051322 artinya semakin baik atau semakin tinggi dukungan pimpinan maka kualitas informasi akuntan akan semakin berkualitas.
2. Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi sebesar 0,5722 positif terhadap kualitas informasi akuntansi artinya kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari kualifikasi staf akuntansi jika kulaifikasinya baik maka akan mendukung terhadap pembuatan pelaporan.
3. Pengaruh penerapan Good Governance sebesar 0,1798 positif terhadap kualitas informasi akuntansi artinya kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari penerapan Good Governance itu baik maka kualitas informasi akan semakin baik dan begitu sebaliknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh dukungan pimpinan dan kompetensi staf akuntansi Penerapan Good Governancae terhadap kualitas informasi keuangan daerah penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dukungan Pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi pada Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya pada umumnya dan staf akuntansinya memiliki kompetensi yang baik. Hal ini terlihat dari interpretasi nilai total jawaban responden mengenai dukungan pimpinan dan kompetensi staf akuntansi menunjukkan kategori baik. Akan tetapi masih ada responden yang menjawab bahwa pimpinan kecamatan belum secara optimal memberikan dukungan kepada staf, dan staf akuntansi di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya masih ada yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. sehingga akan berdampak pada penerapan good governance yang pada akhirnya kualitas informasi tidak menjadi optimal.
2. Informasi Keuangan Daerah di Lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya memiliki kualitas yang baik. Hal ini terlihat dari interpretasi nilai total jawaban responden mengenai kualitas informasi keuangan daerah menunjukkan kategori baik.

3. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 16, bahwa dukungan pimpinan dan kompetensi staf akuntansi secara total berpengaruh terhadap penerapan good governance akan tetapi secara parsial kompetensi staf akuntansi berpengaruh negatif terhadap penerapan good governance. Hal ini berbeda dengan teori.
4. Dukungan pimpinan, kompetensi staf akuntansi dan penerapan good governance baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi keuangan daerah,.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafidz. 2006 .*Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Abdul Halim. 2002. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta :AMP YKPN
- Amirullah dan Haris Budiyono. 2004. *Pengantar Manajemen*, cetakan kedua, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Badan Pemeriksa Keuangan 2010, *Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester*.<http://www.bpk.go.id/web/files/2010/10/IHPS-II-20102.pdf>
- Bambang Widjinarko.*Kajian mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemda dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik*.
<http://www.scribd.com/doc/8577726/RISET-DESAIN>
- BPS dan Bappeda Kabupaten Ciamis. 2009. *Ciamis Regency in Figures 2009 (Kabupaten Ciamis dalam Angka Tahun 2009)*. BPS : Kabupaten Ciamis.
- Bayu. Nurzaman. 2010. *Pengaruh Audit Internal terhadap Good Governance*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Donald Cooper and William Emory. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 5. Jakarta : Erlangga.
- Erie Pratama. 2010. *Kompetensi Akuntansi Pemerintah dengan Mengadopsi Sistem Pendidikan Akuntansi yang Mengacu Pada International Education Standard*.Jurnal Akuntansi Pemerintah
- Financial Accounting Standard Board. 1978. *Statemen of Financial Accounting Concept No. 1 – The Objectives Of Financial Statement*. Connecticut: FASB Publication.
- Gima. Sugiama. 2008. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*, Edisi Pertama. Bandung : Gordaya Intimarta.

- Halimi. Firdausi. 2009. *Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan, Universitas Padjajaran Bandung.
- Indra. Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Jana. Rustia Permana. 2008. *Hubungan Penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan, Universitas Padjajaran Bandung.
- Joko. Widodo. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendikia.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 1 dari 5. Jakarta : LAN
- _____. 2000. *Perencanaan Strategik Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 2 dari 5. Jakarta : LAN
- _____. 2000. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 3 dari 5. Jakarta : LAN
- _____. 2000. *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 4 dari 5. Jakarta : LAN
- _____. 2000. *Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 5 dari 5. Jakarta : LAN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Empat. Yogyakarta : ANDI
- _____. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Vol. 3 No. 2.
- _____. 2007. Serial Otonomi Daerah : "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Edisi Dua. Yogyakarta : ANDI.
- Masri. Singarimbun. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Mudrajat. Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Strategi dan Peluang)*. Jakarta : Erlangga.
- _____. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Nur. Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE

Nisa. Noor Wahid. 2004. *Pengaruh Siklus Anggaran dan Pengawasan Intern terhadap Good Governance*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

Pemerintah Kabupaten Ciamis. 2010. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2009*. Ciamis : Pemerintah Kabupaten Ciamis

P2KP I-LAN. 2007. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah daerah Kabupaen / Kota*. Jakarta : Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I LAN).

Rukaesih. 2004. *Peranan Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan, Universitas Padjajaran Bandung.

Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman. 2007. *Analisa Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia.

Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfa-Beta.

Suharsini Arikunto. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V. Jakarta : PT. Bineka Cipta.

Suliyanto. 2005. *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Peraturan dan Perundang-undangan

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008. Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah.

Pengaruh Dukungan Pimpinan Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Penerapan Good Governance Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah,
Jajang Badruzaman

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

----(000)----